

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di Indonesia, Anggita Sakti (2020) menyatakan bahwa kesempatan memperoleh layanan pendidikan telah diatur dalam Undang-undang yang mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberikan kesempatan secara adil kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setara. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi dan pengecualian untuk mendapatkan layanan pendidikan. Menurut Purnama dan Abadi (2017) negara mengimplementasikan jaminan kepada seluruh anak-anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Salah satu program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi dalam bidang pendidikan adalah pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif didefinisikan memiliki kekuatan untuk membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya tanpa ada pengecualian. Pendidikan inklusif pada tingkat anak usia dini di Indonesia sudah diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2010) mendapatkan hasil bahwa dimulai sejak 20 Januari 2003 lewat surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah No. 380/C.66/MN/2003 perihal pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya terdapat 1 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selanjutnya pada tahun 2004 diselenggarakan Lokakarya Deklarasi Bandung dengan tajuk “Indonesia menuju Pendidikan Inklusif”. Lokakarya ini didasari oleh keadaan penduduk negara Indonesia yang beragam, dan tidak dipungkiri inklusif menjadi jalan untuk menciptakan kehidupan harmonis di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Kemudian secara rinci, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009. Penjelasan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menegaskan bahwa pendidikan inklusif hadir untuk

tidak membeda-bedakan seluruh peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pendidikan tidak lagi mengalami kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Saputra Angga (2016) sejak tahun 2007, sekitar 7,5% atau 15.181 anak berkebutuhan khusus yang tersebar pada 796 lembaga yang menerapkan pendidikan inklusif terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA. Pangestuti & Darsinah (2023) menegaskan dalam penyelenggaraan tidaklah mudah untuk mengelola sekolah inklusif karena dalam prosesnya sekolah inklusif harus mampu memfasilitasi semua aspek perkembangan anak baik regular atau anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan sekolah biasanya, peserta didik sekolah inklusif akan lebih beragam karena menerima anak berkebutuhan khusus. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Roza & Rifma (2020) dalam proses pembelajaran semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak dibeda-bedakan.

Kondisi yang terjadi saat ini masih banyak sekolah-sekolah pada umumnya dan PAUD pada khususnya untuk melaksanakan program pendidikan inklusif. Hal ini juga dipertegas oleh Ayu et al., (2019) menyatakan bahwa hambatan paling besar dalam penerapan pendidikan inklusif ini adalah kondisi sosial dan masyarakat. Lembaga penyelenggara PAUD Inklusif diperlukan kesiapan baik dari tenaga pendidik, sarana prasarana pendukung, dan kurikulum dalam pembelajaran di PAUD Inklusi untuk mengimplemetasikan. Pelaksanaan pendidikan inklusif yang terjadi di lapangan cenderung menilai bahwa jika anak berkebutuhan khusus diberikan pelayanan pendidikan yang bersamaan dengan anak regular maka akan mengganggu proses pendidikan dan pengaruh tidak baik pada anak regular. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dewi (2017) program pendidikan inklusif ini memberikan penting nilai perbedaan dan keberagaman sehingga anak-anak akan saling menghormati dan membantu sama lain sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, seharusnya pendidikan inklusif harus menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan menyediakan hubungan dukungan yang sesuai. Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif, adil, dan setara bagi semua individu serta meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri

dan partisipasi aktif individu dalam masyarakat dan untuk mengurangi stigmatisasi, diskriminasi, dan pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan atau kecacatan, membangun hubungan sosial yang sehat dan saling pengertian.

Terdapat penelitian terdahulu, yang membahas terkait implementasi Pendidikan inklusif di Lembaga PAUD di Indonesia, diantaranya adalah penelitian Anggita Sakti (2020) yang menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitiannya sistem inklusi yang telah diselenggarakan sejak bangku usia dini akan dapat berkontribusi secara maksimal bagi lembaga maupun peserta didiknya. (Anggita Sakti, 2020) menyatakan bahwa praktik sistem pendidikan inklusif yang diimplementasikan pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini masih menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang berat dengan ditemukannya persoalan pelaksanaan pendidikan inklusi yang ternyata masih tidak inklusif. Dukungan lingkungan dan kolaborasi yang baik antara pemangku kebijakan dan *stakeholder* yang ada dirasa mampu menciptakan rasa optimisme terkait dengan layanan pendidikan inklusi yang semakin baik lagi ke depannya.

Fakta dilapangan yang ditemukan Purnama et al., (2017) bahwa persoalan utama adalah pelaksanaan pendidikan inklusif yang ternyata tidak inklusif. Pendidikan inklusif di Indonesia harus melibatkan orang tua, guru, dan lingkungan, ketiga peran tersebut harus memiliki persepsi yang sama pada pendidikan inklusif, namun yang terjadi hanya orang tua yang memiliki persepsi positif terhadap pendidikan inklusif. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan evaluasi penyelenggara pendidikan PAUD Inklusif ditinjau dari prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kehadiran pendidikan inklusif pada PAUD merupakan respon terhadap pemenuhan hak PAUD dengan kebutuhan ABK. Menurut Windarsih et al., (2017) upaya PAUD bukan hanya dari sisi pendidikan saja tetapi termasuk upaya pemberian stimulasi, bimbingan, pengasuhan dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. PAUD X merupakan salah satu lembaga yang sudah memiliki pengakuan sebagai lembaga

PAUD inklusif yang terdapat di Kota Bandung. PAUD X memberikan pelayanan pendidikan yang ditujukan kepada semua anak usia dini tanpa diskriminatif dengan ragam latar belakang, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usiannya. Dilansir dari situs *website* PAUD X bahwa program inklusif ini sudah terlaksana sejak tahun 2005 dengan membentuk tim orthopedagog dan guru pendamping dengan tujuan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat terlayani sesuai dengan kelebihan, hambatan dan minat bakatnya. PAUD X juga memiliki 3 konsep diantaranya *learning and experiences*, keceriaan dan keramahan. PAUD X juga berkomitmen untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang menjadi manusia yang bermanfaat untuk masa depan. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pengelola PAUD X, beliau berbicara banyak hal terkait pendidikan inklusi, dimulai dari permasalahan anak berkebutuhan khusus, problematika dalam proses pembelajaran inklusif dan keterbatasan aksesibilitas sarana prasarana.

Dengan demikian, peneliti berkeinginan kuat untuk menggali lebih dalam layanan pendidikan inklusi di PAUD X. Kebaruan dari penelitian penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Penyelenggaraan Layanan Inklusif pada Lembaga PAUD”. yaitu memberikan analisis terkait pengimplementasian layanan inklusif pada PAUD X. Penelitian dengan topik tersebut belum pernah dilakukan di daerah dan tempat penelitian yang penulis pilih, meskipun penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada pelayanan inklusif di PAUD X. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan penyelenggaraan layanan ninklusif pada PAUD sebagai dasar pertimbangan, pendukung, dan sumbang pemikiran kepada pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif yang adil dan tanpa diskriminasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan layanan inklusif pada ABK di PAUD X?

2. Apa saja kendala dan solusi dari implementasi penyelenggaraan layanan inklusif pada ABK di PAUD X?
3. Apa saja faktor pendukung dari implementasi penyelenggaraan layanan inklusif pada ABK di PAUD X?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, menjabarkan, dan mendeskripsikan, sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan layanan inklusif pada ABK di PAUD X.
2. Kendala dan Solusi dari mplementasi penyelenggaraan layanan inklusif pada ABK di PAUD X.
3. Faktor pendukung dari mplementasi penyelenggaraan layanan inklusif pada ABK di PAUD X.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

- a. Melalui penyelenggaraam pendidikan inklusif diharapkan ada kontribusi berupa ilmu dalam hal peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Memperoleh perkembangan pengetahuan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sedang berlangsung.
- c. Sebagai pelengkap landasan teori untuk kegiatan- kegiatan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan mengenai implementasi pendidikan inklusif di lembaga PAUD.
- b. Memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan dan landasan yang dapat diterapkan pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan inklusif.

1.5. Struktur Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Struktur Penulisan

BAB II Kajian Pustaka

2.1 Konsep pendidikan Inklusif

2.3 Pendidikan Anak Usia Dini

2.3 Implementasi Pendidikan Inklusif

2.4 Kerangka Berpikir

2.5 Penelitian Terdahulu

BAB III Metode Penelitian.

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.2 Deskripsi Partisipan dan Lokasi Penelitian

3.3 Prosedur Penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Instrumen Penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

3.7 Isu Etik

BAB IV Temuan dan Pembahasan

4.1 Temuan

4.2 Pembahasan

BAB V Simpulan, implikasi dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

5.2 Implikasi

5.3 Rekomendasi